

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026. PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI NASDEM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kebumen menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Fraksi mencatat pendapatan daerah sebesar Rp2.905.938.596.332,00 dan belanja daerah sebesar Rp3.127.053.496.420,00, serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi serta perluasan QRIS/e-ticketing untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Fraksi juga meminta percepatan realisasi belanja modal dan peningkatan capaian e-purchasing, serta perbaikan dan penyempurnaan mekanisme bantuan sosial pada tahun anggaran berikutnya. Perhatian khusus diberikan pada program penanggulangan kemiskinan agar diprioritaskan pada daerah-daerah kantong kemiskinan, disertai dorongan untuk mempercepat pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021. Fraksi berharap Perubahan APBD dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Catatan:

- Pendapat Akhir disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 8 September 2026.
- Fraksi Partai NasDem menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dokumen ditandatangani oleh Faiq Hasan selaku Ketua Fraksi dan Sri Parwati, A. selaku Sekretaris Fraksi.
- Dokumen terdiri atas 7 halaman termasuk halaman sampul.

Kata Kunci: Fraksi Partai NasDem; Perubahan APBD 2026; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Modal; Bantuan Sosial; Penanggulangan Kemiskinan; Pariwisata; Kesejahteraan Masyarakat

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026. FINAL OPINION OF THE NASDEM PARTY FACTION ON THE DRAFT REGIONAL REGULATION CONCERNING THE AMENDMENT TO THE 2026 REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

The NasDem Party Faction of the Kebumen Regency Regional House of Representatives (DPRD) accepted and approved the Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the 2026 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for enactment as a Regional Regulation and further processing in accordance with applicable procedures, statutory regulations, and the public interest. The Faction noted regional revenue of IDR 2,905,938,596,332.00 and regional expenditure of IDR 3,127,053,496,420.00, and called for the optimization of Regional Own-Source Revenue through intensified tax and levy collection and expanded use of QRIS/e-ticketing to reduce dependence on transfer revenues.

The Faction also called for accelerated capital expenditure and improved e-purchasing performance, as well as improvements to the social assistance mechanism in the following fiscal year. Particular emphasis was placed on prioritizing poverty reduction programs in areas with high concentrations of poverty, alongside accelerating the establishment of the Regional Tourism Promotion Board as mandated by Regional Regulation Number 3 of 2021. The Faction expected the amended APBD to be implemented effectively, efficiently, transparently, and accountably for the welfare of all segments of the Kebumen Regency community.

Note:

- *The Final Opinion was presented at the Plenary Meeting of the Kebumen Regency DPRD on September 8, 2026.*
- *The NasDem Party Faction accepted and approved the Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the 2026 APBD for enactment as a Regional Regulation.*
- *The document was signed by Faiq Hasan, as Chair of the Faction, and Sri Parwati, A., as Secretary of the Faction.*
- *The document consists of 7 pages, including the cover page.*

Keywords: *NasDem Party Faction; 2026 APBD Amendment; Regional Own-Source Revenue; Capital Expenditure; Social Assistance; Poverty Reduction; Tourism; Community Welfare*